



2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMEINTAH (LKjIP)

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN NATUNA

JL. Taruna Gedung BLK Ranai
Kabupaten Natuna



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan Rahmat dan Karunia-NYA kepada kita semua sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan gambaran hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna tahun Anggaran 2024.

Disadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna tahun 2024 belum secara sempurna menyajikan prinsip Akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna.

Untuk itu kritikan dan saran yang sifatnya membangun, sangat diharapkan demi kesempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna.

Demikianlah laporan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dimasa yang akan datang, dan bagi semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan ini, kami ucapkan terimakasih, semoga menjadi amal hendak-NYA Amin.

Ranai, 13 Januari 2025





IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Natuna, dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*), sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Natuna dalam melayani/ memenuhi kebutuhan serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerja.

LKjIP Tahun 2024 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 sebagai dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna.

Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di tahun 2024 sebesar 100,10 persen dengan skala penilaian sangat memuaskan sesuai dengan penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dengan Bupati Natuna, adapun Perjanjian Kinerja tersebut berisikan 1 Sasaran Kinerja dan 1 Indikator Kinerja.

Akuntabilitas kinerja dibandingkan dengan akuntabilitas penyerapan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 dimana total



anggaran belanja APBD tahun 2024 sebesar Rp. 7,104,937,632.00 terealisasi sebesar Rp. 5,879,327,587.00 (82,75%).

Efisiensi anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2024 sebesar Rp. 1,225,610,045.00 atau 17,26%. Efisiensi berupa sisa belanja tahun 2024.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Ringkasan Eksekutif	2
Daftar Isi	4
Bab I Pendahuluan	5
1.1 Gambaran Umum	5
1.2 Maksud dan Tujuan	7
1.3 Sistematika Penulisan	8
Bab II Perencanaan Kinerja	10
2.1. Rencana Strategis	10
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
2.3. Program Kerja dan Kegiatan	15
Bab III Akuntabilitas Kinerja	14
3.1. Pengukuran Kinerja	14
3.2. Analisis Kinerja	16
3.3. Analisis Keuangan	23
Bab IV Penutup	29
Lampiran – lampiran	



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Dalam Penyusunannya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2024 memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKjIP, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Bupati Natuna yang disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja yang merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2024.

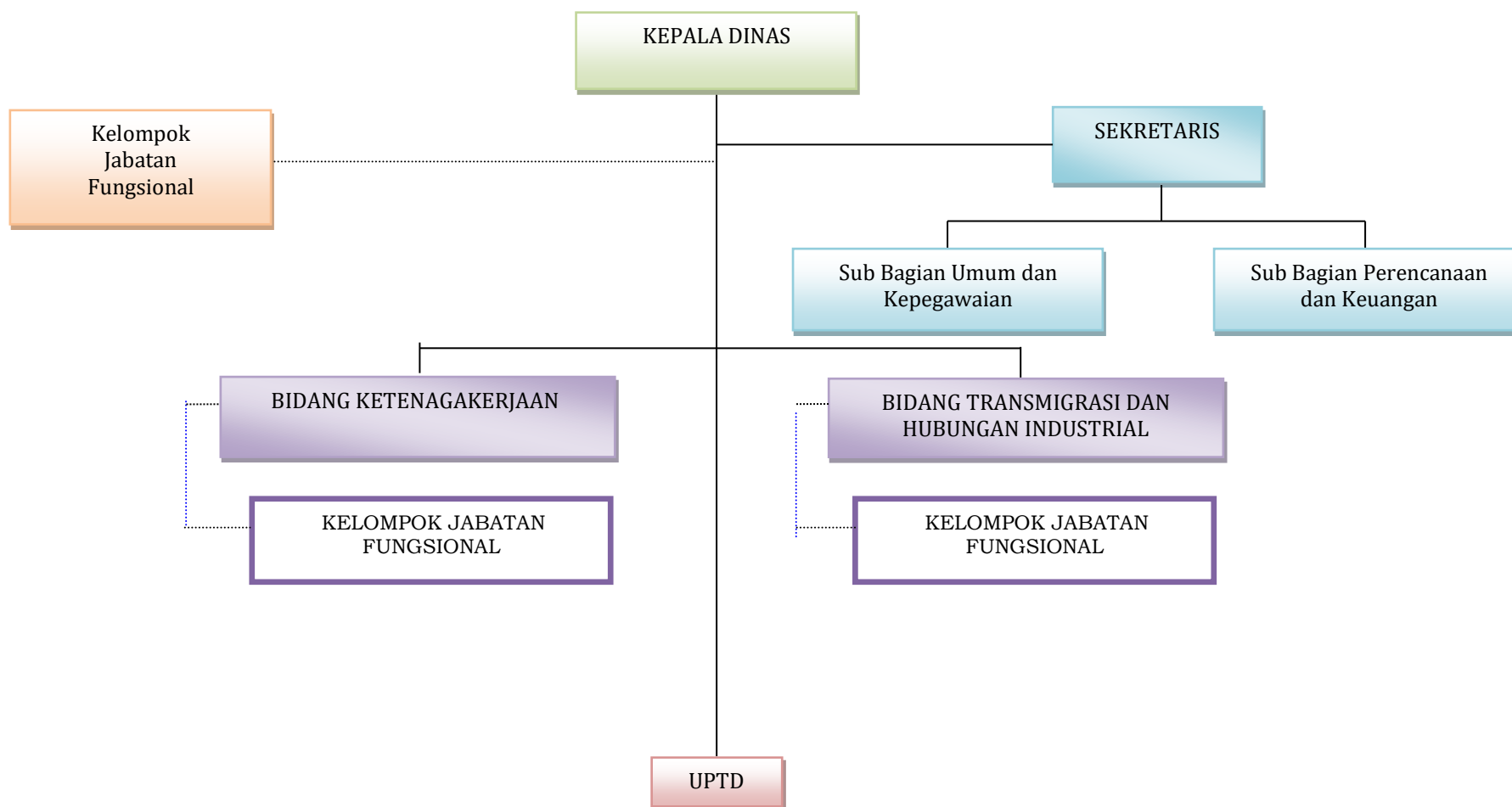
Kedudukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Natuna 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran



Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16). Dengan Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut:



Gambar 1
BAGAN STUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA





A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

B. Fungsi

Dalam mewujudkan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai beberapa fungsi diantaranya:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
- d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

C. Kewenangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna mempunyai kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh Kepala Dinas, Sekretariat, dan setiap bidangnya yang meliputi butir-butir pelaksanaan kegiatan diantaranya sebagai berikut :



- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan dan menetapkan kebijakan daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, aset dan barang persediaan;
 - c. Menetapkan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, aset dan barang persediaan di lingkup dinas;
 - d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak; terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. menetapkan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, aset dan barang persediaan di lingkup Dinas;
 - f. merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
 - g. membina dan mengevaluasi kinerja pegawai dilingkup dinas;
 - h. mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.



1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2024 adalah sebagai informasi laporan akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2024 adalah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024.



Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Berkaitan dengan peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan sesuai kewenangannya. Hal-hal yang bersifat strategis terkait pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Natuna:

1. Bidang Tenaga Kerja

- 1) Peningkatan efektifitas peran perencanaan tenaga kerja yang merupakan *guidance* dalam pemecahan berbagai permasalahan ketenagakerjaan di masa yang akan datang sehingga mampu mengarahkan pembangunan ketenagakerjaan kepada tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan dan agenda SDGs.
- 2) Memanfaatkan Informasi Pasar Kerja secara tepat dan berguna bagi pencari kerja.
- 3) Memberdayakan dan mendayagunakan angkatan kerja secara optimal.
- 4) Mewujudkan kesempatan kerja yang menggambarkan ketersediaan kesempatan kerja dalam jumlah dan kualitas yang memadai/layak bagi seluruh angkatan kerja.
- 5) Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas kerja, disiplin, sikap dan etos kerja kepada seluruh angkatan kerja pada tingkat keterampilan dan



keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan oleh pembangunan daerah.

- 6) Efektifitas hubungan industrial dalam mewujudkan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha (*industrial peace*) sehingga dapat mendorong produktifitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan kesempatan kerja.
- 7) Mewujudkan kesejahteraan para buruh/pekerja/karyawan dan keluarganya melalui sistem pengupahan yang berkeadilan dan layak.
- 8) Memberikan perlindungan dasar bagi angkatan kerja terhadap risiko bekerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja. bekerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

2. Bidang Transmigrasi

- 1) Pengembangan Kawasan Transmigrasi diarahkan pada Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan di Kawasan Transmigrasi dan Eks. Satuan Kawasan Pengembangan Transmigrasi yang dapat mendorong kemandirian masyarakat dan desa di Kawasan Transmigrasi.
- 2) Meningkatkan pemahaman Masyarakat, Aparatur Desa, Aparatur Kecamatan dan Unsur Instansi terkait mengenai Ketransmigrasian, Kawasan Transmigrasi dan Aset Transmigrasi.



- 3) Meningkatkan Kemandirian Satuan Pemukiman Transmigrasi melalui Pemberdayaan masyarakat dan desa Eks. Satuan Permukiman Transmigrasi dan sekitarnya.
- 4) Meningkatkan Swadaya Masyarakat dan desa Eks. Satuan Permukiman Transmigrasi dan sekitarnya melalui Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan.
- 5) Meningkatkan koordinasi dan pendekatan-pendekatan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, instansi terkait di Daerah dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi dan sekitarnya dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Penyelesaian permasalahan Transmigrasi.
- 6) Penatausahaan Pencadangan Tanah di Kawasan Transmigrasi dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan transmigrasi serta upaya pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan dan penguasaan lahan oleh masyarakat.
- 7) Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan data-data dan dokumen penunjang yang diperlukan untuk penyelesaian permasalahan transmigrasi.
- 8) Pembangunan dan pengembangan transmigrasi diarahkan dalam rangka mewujudkan kawasan transmigrasi yang berkembang, mandiri dan berdaya saing sebagai pusat pertumbuhan wilayah (kota-kota kecil/kecamatan).
- 9) Fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi.



- 10) Memacu pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk mengembangkan kawasan transmigrasi yang diarahkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah melalui pembangunan kawasan transmigrasi yang berkembang, mandiri dan berdaya saing sebagai pusat pertumbuhan wilayah (kota-kota kecil/kecamatan).

Isu strategis yang harus diselesaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna dirumuskan melalui penelaahan terhadap kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna, penelaahan visi dan misi kepala daerah dalam RPJMD, penelaahan terhadap sasaran-sasaran strategis kementerian dan perangkat daerah. Berdasarkan analisis tersebut, isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing dalam menghadapi pasar kerja dan iklim hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.
2. Perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa eks. satuan permukiman transmigrasi dan sekitarnya di kawasan transmigrasi



1.3. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. (Sesuaikan dengan PD)



3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (Jika ada).
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian (pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Program dan Kegiatan Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama Pada PD.
2. Membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa



mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja (PK);
- 2) Pengukuran Kinerja;
- 3) Lain-lain



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menjalankan Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2021-2026.

Dalam konteks yang lebih luas, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (Tahun 2016-2021).

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2021.

2.1.1. Visi dan Misi

Sesuai dengan dokumen RPJMD, Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 adalah:



“Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 7 (tujuh) Misi sebagai berikut:

Misi Pertama **Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia**. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang religius dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan masyarakat; Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia.

Misi Kedua **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal**. Hal ini bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan.

Misi Ketiga **Menciptakan Kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis**. Hal ini bertujuan untuk pengelolaan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis.

Misi Keempat **Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur**. Hal ini



bertujuan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Misi Kelima **Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan**. Hal ini bertujuan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup yang mendukung kehidupan masyarakat.

Misi Keenam **Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucrac*)**. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Misi Ketujuh **Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi**. Hal ini bertujuan untuk peningkatan penggunaan dan pemanfaatan teknologi digital bagi semua sektor.

Berdasarkan telaah Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Natuna, Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Natuna terkait langsung dengan pencapaian :

1. Misi ke- 2 yaitu **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal**
2. Misi ke- 6 yaitu **Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucrac*)**



2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Sesuai cascade kinerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendukung Misi Pemerintah Daerah nomor dua yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dengan pencapaian Tujuan Pemerintah Daerah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Tinggi dan Berkelanjutan, dengan indikator Tujuan Angka Kemiskinan dan Misi Keenam Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (Smart Bureaucracy) dengan tujuan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) indikator sasaran Indeks Reformasi Boirokrasi. Terkait hal tersebut tujuan dan tujuan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna tahun 2024 sebagai berikut :



Tabel II.1.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
Misi : 2 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal						
1	Meningkatnya Angka Partisipasi Angkatan Kerja melalui peningkatan keterampilan bagi pencari kerja	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	72,36
2	Terwujudnya penyelesaian permasalahan keteransmigrasian di kawasan transmigrasi Kabupaten Natuna	Persentase kawasan eks transmigrasi yang difasilitasi penyelesaiannya	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Keteransmigrasian di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Natuna	Persentase Penyelesaian Permasalahan keteransmigrasian yang diselesaikan	%	65
Misi : 6 Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (SMART BUREAUCRACY)						
1	Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	Nilai	81,90
2	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Indeks pelayanan publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,48



2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2.
Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Angka Partisipasi Angkatan Kerja melalui peningkatan keterampilan bagi pencari kerja	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Memperluas kesempatan kerja dan menumbuhkan jiwa wirausaha dan peningkatan penempatan tenaga kerja	Pemberian pelatihan bagi para tenaga kerja
			Meningkatkan skill tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar
			Penyediaan informasi kebutuhan tenaga kerja
			Menjalin kerjasama dengan dunia usaha
		Pembinaan hubungan industrial melalui peningkatan perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Meningkatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi para pekerja

2.1.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah dan Perjanjian



Kinerja Kepala OPD bersumber dari IKU OPD yang sudah ditetapkan. IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2022.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel II.3.
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Keterangan
1	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	<u>Jumlah Penduduk Angkatan Kerja</u> Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun)

2.2. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Kabupaten Natuna sebagai berikut:



Tabel II.4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	72,36

TPAK adalah persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Tingginya TPAK mencerminkan potensi ekonomi suatu negara atau wilayah dalam memanfaatkan tenaga kerja.

Faktor-faktor yang memengaruhi TPAK:

- Pendidikan dan keterampilan penduduk.
- Ketersediaan lapangan kerja.
- Kebijakan ekonomi, sosial, dan ketenagakerjaan.
- Program-program pelatihan dan pengembangan kompetensi kerja.



Selanjutnya, sasaran strategis beserta indikator utama diuraikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran.

Tabel II.5
Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,16
	Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Lulusan Bersertifikat Kompetensi	Persen	77
	Sub Kegiatan Proses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	16
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	94
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	Lowongan Kerja	7
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	20
	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persen	5
	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota	Persentase perkara yang diselesaikan	Persen	60
	Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	1



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	3250

Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan beserta anggaran yang mendukung sasaran IKU:

Tabel II.6.
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Anggaran
Pendukung Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	270,644,450
	1. Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	270,644,450
	1.1. Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	270,644,450
	Program Penempatan Tenaga Kerja	93,130,970
	1. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	93,130,970
	1.1. Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	93,130,970
	Program Hubungan Industrial	128,600,980
	1. Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota	128,600,980



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	1.1. Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	91,645,980
	1.2. Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	36,955,000
Total		492,376,400

Pada tahun 2024 program pendukung IKU terdiri atas tiga program yaitu program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial. Ketiga program tersebut mempunyai anggaran sebesar Rp. 492,376,400,-.

Selain sasaran pendukung IKU, terdapat juga sasaran beserta program, kegiatan Non IKU yaitu sasaran penunjang yang dimiliki OPD sebagai berikut :

Tabel II.7.
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
Non Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	81.90
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2
Terwujudnya pelayanan publik yang prima	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	85
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	59.30
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah	60
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	59.40
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1
Terwujudnya penyelesaian permasalahan keterasmigrasian di kawasan transmigrasi Kabupaten Natuna	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Ditetapkan	100
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Penetapannya	1
	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan	100
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Kawasan Permukiman yang difasilitasi Pengembangannya	2
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	6
BALAI LATIHAN KERJA			
Terwujudnya pelayanan publik yang prima	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	85
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	57
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12

Sasaran Non IKU berkaitan dengan Program, kegiatan dan Sub kegiatan beserta Anggaran yang dilaksanakan Tahun 2024 :

Tabel II.8.
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Anggaran
Non Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran (Rp)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		6,453,809,792
Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32,192,080
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32,192,080
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32,192,080
Terwujudnya pelayanan publik yang prima	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,350,218,692
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,906,503,852
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,906,503,852
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	416,388,640
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31,479,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37,733,300



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran (Rp)
Terwujudnya penyelesaian permasalahan keteransmigrasian di kawasan transmigrasi Kabupaten Natuna	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,736,400
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32,395,340
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305,044,600
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	211,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	483,824,200
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37,295,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98,629,200
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	347,900,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332,502,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102,412,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,090,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	41,230,420
BALAI LATIHAN KERJA	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	41,230,420
	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	41,230,420
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	30,168,600
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	30,168,600
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	30,168,600
	BALAI LATIHAN KERJA	158,751,440
Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	158,751,440
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96,251,440
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21,746,400
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	457,800



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA

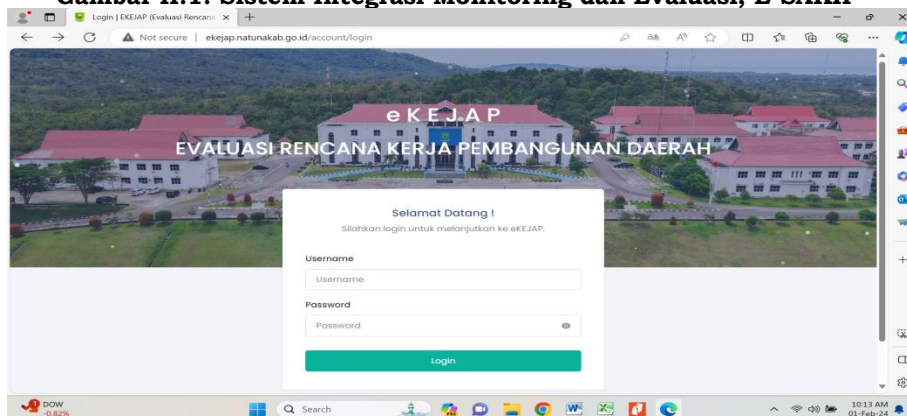
Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran (Rp)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4,425,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69,622,240
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62,500,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55,500,000
Total		6,612,561,232

Dari tabel diatas anggaran pendukung Non IKU berjumlah Rp. 6,612,561,232, anggaran ini terdiri atas program yang mendukung rutinitas kantor beserta program transmigrasi.

2.3. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah aplikasi eKEJAP yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), monitoring dan evaluasi capaian kinerja per triwulan.

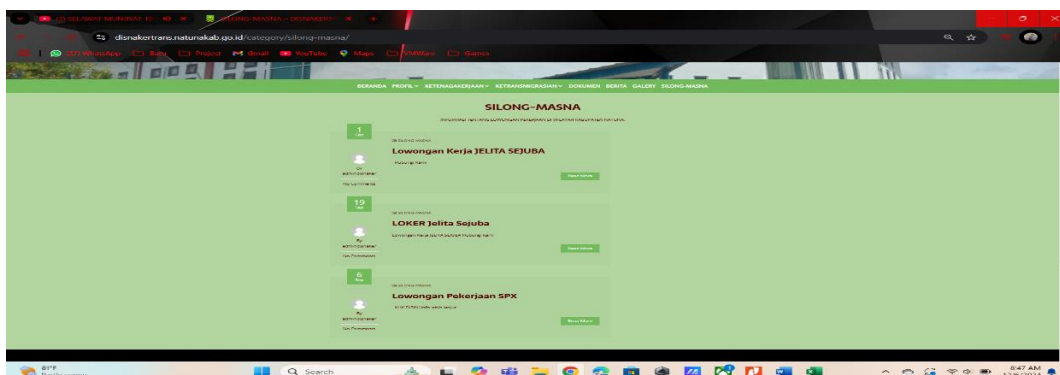
Gambar II.1. Sistem Integrasi Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP





2. Layanan Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan Masyarakat Natuna (SILong MasNa) merupakan wadah informasi berbasis website yang berfungsi untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan bagi Masyarakat khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Natuna, yang dijemputani oleh Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan pihak pemberi kerja (Perusahaan atau tempat-tempat usaha besar dan menengah) dengan tujuan layanan untuk memudahkan pencari kerja dalam memperoleh informasi lowongan pekerjaan yang ada di Kabupaten Natuna.

Gambar II.2. Sistem Informasi Lowongan Kerja (SILong MasNa)





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi secara transparan kepada para pemangku kepentingan. Pengukuran kinerja digunakan dalam rentang waktu satu tahun anggaran untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan penerapan manajemen kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa masukan, keluaran (output) dan hasil (outcome).

Akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna tahun 2024 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna 2021-2026, kemudian difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi indikator kinerja sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target indikator kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja strategis dengan realisasi kinerjanya.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna.



Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut :

SKALA PENILAIAN

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90–100	Sangat Memuaskan
2	A	>80–90	Memuaskan
3	BB	>70–80	Sangat Baik
4	B	>60–70	Baik
5	CC	>50–60	Cukup Baik
6	C	>30–50	Agak Kurang
7	D	0–30	Kurang



3.2 Analisis Kinerja

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja sedangkan analisis adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2024.

Sasaran 1 : Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK adalah persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Tingginya TPAK mencerminkan potensi ekonomi suatu daerah dalam memanfaatkan tenaga kerja.

Tabel III.1.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,36	72,43	100,10

Capaian indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja diukur dengan membandingkan jumlah penduduk angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja 15 tahun keatas, berdasarkan data Kabupaten Natuna Dalam Angka Tahun 2024 jumlah penduduk angkatan kerja tahun 2023 sebanyak 44.721 orang, sementara jumlah penduduk usia kerja 15 tahun keatas sebanyak 61.743 orang, sehingga terealisasi sebesar 72,43 persen dengan capaian kinerja sebesar 100,10 persen.

Data berikut merupakan data usia kerja 15 Tahun ke atas yang bersumber dari Kabupaten Natuna Dalam Angka 2024 :



Tabel: III.2
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Tahun 2023

Indikator	Jumlah
Angkatan Kerja	44.721
Penduduk bekerja	42.912
Penduduk yang menganggur	1.809
Bukan Angkatan Kerja	17.022
Jumlah/Total	61.743

Sumber: NDA Kab. Natuna 2024

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Natuna memiliki tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Penduduk usia kerja pada Agustus 2023 sebanyak 61.743 orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu sebanyak 44.721 orang (72,43 persen), sedangkan 27,57 persen lainnya merupakan bukan angkatan kerja, sebagaimana tabel III.2.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan NDA 2024, Sektor Jasa adalah lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu sebesar 26,37 persen, kemudian diikuti oleh Sektor Pertanian sebesar 9,22 persen, dan paling sedikit pada Sektor Manufaktur sebesar 7,31 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan NDA 2023, dimana Sektor Jasa adalah lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak, diikuti Sektor Pertanian dan Sektor Manufaktur.

Adapun Faktor-faktor yang memengaruhi TPAK yaitu :

- Pendidikan dan keterampilan penduduk
- Ketersediaan lapangan kerja
- Kebijakan ekonomi, sosial, dan ketenagakerjaan
- Program-program pelatihan dan pengembangan kompetensi kerja



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna selama Tahun 2024 telah melakukan aksi yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia atau skill yaitu :

1. Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi

Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Pelatihan berbasis kompetensi menekankan pada:

- Peningkatan keterampilan teknis sesuai industri
- Adaptasi terhadap perubahan teknologi
- Penyediaan sertifikasi sebagai bukti kompetensi pekerja

Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi erat hubungannya dengan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) dalam hal :

- **Meningkatkan keterlibatan kerja:** Pelatihan yang relevan membuka peluang lebih besar bagi angkatan kerja untuk masuk ke sektor formal atau informal.
- **Mengurangi pengangguran:** Keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja mengurangi kesenjangan antara pencari kerja dan kebutuhan perusahaan.
- **Memotivasi partisipasi:** Penduduk yang tidak aktif ekonomi, seperti ibu rumah tangga atau lulusan baru, dapat terdorong untuk masuk ke dunia kerja dengan adanya pelatihan.

2. Program Perluasan Kesempatan Kerja

Perluasan kesempatan kerja mencakup kebijakan dan program yang bertujuan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, seperti:

- Pengembangan usaha kecil dan menengah

Hubungan antara program perluasan kesempatan kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yaitu :

- **Menarik angkatan kerja potensial:** Dengan lebih banyak lapangan kerja yang tersedia, partisipasi angkatan kerja meningkat.



- **Mengurangi migrasi keluar:** Jika ada pekerjaan yang layak di dalam negeri, lebih banyak tenaga kerja lokal yang memilih untuk tetap bekerja di wilayah tersebut.
- **Meningkatkan produktivitas nasional:** Kesempatan kerja yang luas mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan daya beli.

Tabel berikut menunjukkan tenaga kerja yang sudah mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 2019 s/d 2024:

Tabel: III.3
Jumlah Tenaga Kerja bersertifikasi

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja	%
2019	168	35265	0.48
2020	187	38486	0.49
2021	240	40343	0.59
2022	333	40343	0.83
2023	456	44721	1.02
2024	556	44721	1.24

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna telah melaksanakan program pelatihan kerja berbasis kompetensi sejak tahun 2019 sampai sekarang tahun 2024 dengan tenaga kerja bersertifikat kompetensi berjumlah 556 orang, dalam pelaksanaan kegiatan didukung sumber anggaran dari APBN maupun APBD.

Pelaksanaan pelatihan bersumber APBN dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Natuna dengan paket pelatihan disesuaikan dengan alat praktek yang tersedia seperti paket menjahit, paket kelistrikan, paket Otomotif dan paket las, sedangkan anggaran yang bersumber dari APBD paket pelatihan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan dilaksanakan



dengan melakukan MoU atau Kerjasama dengan penyedia jasa Balai pelatihan berbasis kompetensi Batam yang dilaksanakan di BLK Natuna.

**Sasaran 2 : Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan
Keteransmigrasian di Kawasan Transmigrasi
Kabupaten Natuna**

Tabel: III.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Penyelesaian Permasalahan keteransmigrasian yang diselesaikan	Persen	65	83,04	127,75

Pada sasaran Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Keteransmigrasian di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Natuna dengan indikator Persentase Penyelesaian Permasalahan Keteransmigrasian yang diselesaikan terealisasi sebesar 83,04 persen dengan capaian 127.75 persen.

Adapun jenis permasalahan keterasmigrasian yaitu:

1. Permasalahan Kawasan hutan HPK untuk LU II seluas 1.461 HA SKP B Batubi SP 1, 2 dan 3.
2. Permasalahan sertifikat LU II Hak milik transmigras SKP B Batubi SP 1, 2 dan 3.
3. Permasalahan aset transmigrasi di Kawasan transmigrasi Natuna.
4. Permasalahan legalitas eks. Permukiman Transmigrasi.

**Sasaran 3 : Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah**

Tabel: III.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai LAKIP	Nilai	81,90	74,20	90,60

Pada sasaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Lakip terealisasi sebesar 74,20/skala BB dengan capaian kinerja 90,60 Persen. Berarti **tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinilai baik**, namun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan sebagian besar prinsip-prinsip akuntabilitas dengan efektif, tetapi ada ruang untuk perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

Nilai LAKIP tahun 2024 menggunakan Nilai Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Tahun 2023.

Nilai LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan hasil dari proses evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana instansi telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program kerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

**Sasaran 4 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat**

Tabel: III.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,48	3,41	97,99

Pada sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat terealisasi sebesar 3,41 dengan capaian kinerja 97,99 Persen.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi publik. IKM mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan berdasarkan sejumlah indikator yang telah ditentukan.

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa pelayanan dalam hal pelaksanaan pelatihan kerja bagi tenaga kerja yang telah memasuki usia kerja yaitu usia 15 Tahun sampai 64 Tahun.

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di ruang kerja Bidang Ketenagakerjaan dan dilakukan pada jam kerja. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri melalui formulir yang dibagikan kepada responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan dan dikelola oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna. Dengan cara ini penerima layanan melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari tim survei..



3.2.1. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir

Tabel berikut merupakan perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya :

Sasaran 1 : Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tabel. III.7
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1
Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72.33	72.35	72.36	67.89	72.43	72.43	93.86	100.11	100.10

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2022 realisasi kecil. Hal ini terjadi disebabkan pemulihan ekonomi belum merata, tahun 2022 merupakan masa transisi pemulihan dari pandemi COVID-19. Beberapa sektor mungkin masih dalam tahap pemulihan, sehingga belum banyak menyerap tenaga kerja.



**Sasaran 2 : Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan
Keteransmigrasian di Kawasan Transmigrasi
Kabupaten Natuna**

Tabel. III.8
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2
Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Persentase Penyelesaian Permasalahan keteransmigrasian yang diselesaikan	55	60	65	57,09	79,61	83,04	103.8	132.68	127,75

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian realisasi untuk indikator Persentase Penyelesaian Permasalahan keteransmigrasian yang diselesaikan dari tahun 2022 sampai 2024 mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan, hal ini terjadi disebabkan permasalahan keteransmigrasian sudah diselesaikan secara berkala tiap tahunnya dan akan dilanjutkan penyelesaian pada tahun berikutnya.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Tabel. III.9
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3
Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Nilai LAKIP	81.88	81.89	81.9	71.05	74.20	74.20	86.77	90.61	90.60

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian realisasi indikator Nilai Lakip mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan, hal ini menunjukkan Dinas



Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan peningkatan kinerja yang baik dan akuntabel.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Tabel. III.10
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4
Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.46	4.47	3.48	3.24	3.15	3,41	3,24	3,15	97,99

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami penurunan di tahun 2023, namun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah berupaya memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.

3.2.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatife Solusi yang Pernah Dilakukan

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja pada indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Lapangan Pekerjaan

Lapangan pekerjaan tidak beragam serta tidak banyak pilihan dan tersedia hanya sektor tertentu saja seperti perikanan dan pariwisata, sehingga membatasi diversifikasi pekerjaan dan pilihan bagi angkatan kerja.



2. Minimnya Pelatihan dan Sertifikasi

Program pelatihan kerja yang terbatas menyulitkan angkatan kerja untuk memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan.

3. Informasi Lowongan Kerja belum tersedia

Website atau aplikasi informasi lowongan kerja belum tersedia sehingga menyulitkan akses informasi bagi pengguna layanan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan guna percepatan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, diantaranya :

1. Melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Natuna dalam penempatan lowongan kerja yang tersedia melalui Aplikasi SILong MasNa (Sistem Informasi Lowongan Kerja Masyarakat Natuna);
2. Selain mengandalkan pelatihan bersumber dari dana APBD, Dinas Tenaga Kerja juga melakukan Kerjasama pelatihan dengan Balai Latihan Medan yang bersumber dari dana APBN dari Kementerian Tenagakerja dengan paket-paket pelatihan yang disesuaikan dengan alat praktek yang tersedia di BLK Natuna, seperti : kejuruan menjahit, kejuruan otomotif dan kejuruan listrik.
3. Membangun system informasi lowongan kerja bagi masyarakat Kabupaten Natuna melalui website resmi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berkolaborasi dengan para perusahaan yang ada di Kabupaten Natuna, dan telah melakukan MOU antara kedua belah pihak.



3.2.3. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjukkan Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

3.2.3.1. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung IKU

Tabel. III.11
Capaian Indikator Kinerja Sasaran IKU
Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0.16	1.24	774.24
	Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Lulusan Bersertifikat Kompetensi	Persen	77	80.33	104.32
	Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	16	16	100
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	94	2.33	2.47
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	Lowongan Kerja	7	15	214,28
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	20	20	100
	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persen	4	33.33	833.33
	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota	Persentase perkara yang diselesaikan	Persen	60	0	100



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	1	0	100
	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	3250	3762	115.75

Program pendukung IKU terdapat 3 (tiga) program dengan masing-masing capaian sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja terealisasi sebesar 1,24 persen dengan capaian kinerja sebesar 774,24 persen. Hal ini berasal dari penghitungan jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi sampai tahun 2024 sebanyak 554 orang sementara itu jumlah tenaga keseluruhan tahun 2024 masih menggunakan data BPS Tahun 2023 berjumlah 44.721 orang. Sementara itu kegiatan pendukung program yaitu kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dengan realisasi sebesar 80,33 persen atau tercapai 104,32 persen. Hal ini berasal dari penghitungan Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi pada tahun n yang berjumlah 98 orang sedangkan jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n berjumlah 122 orang. Sub kegiatan pendukung adalah Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi dengan realisasi sebesar 16 orang atau tercapai 100 persen.
5. Program Penempatan Tenaga Kerja terealisasi sebesar 2,33 persen dengan capaian kinerja sebesar 2,47 persen.



Hal ini berasal dari Jumlah pencari kerja yang ditempatkan tahun 2024 hanya sebanyak 3 orang sementara itu jumlah pencari kerja yang terdaftar tahun 2024 sebanyak 129 orang atau tercapai 2,47 persen. Data yang digunakan bersumber dari data pencari kerja yang terdaftar atau AK1.

Kecilnya capaian program salah satu penyebabnya adalah pencari kerja yang mendaftar AK1 tidak memberikan informasi ke Disnakertrans apakah mereka sudah ditempatkan atau tidak, padahal Disnakertrans sudah mengingatkan agar pendaftar AK1 selanjutnya melapor/memberikan informasi ke Disnaker terkait hal tersebut.

Sementara itu kegiatan pendukung program yaitu kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar 15 lowongan kerja atau tercapai 214,29 persen.

Sub kegiatan pendukung adalah Perluasan Kesempatan Kerja dengan realisasi sebesar 20 orang atau tercapai 100 persen.

6. Program Hubungan Industrial terealisasi sebesar 33,33 persen dengan capaian kinerja sebesar 833,33 persen.

Hal ini berasal dari jumlah perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak tahun 2024 sebanyak 9 perusahaan dari total Perusahaan tahun 2024 sebanyak 27 perusahaan.

Besarnya capaian program disebabkan Disnakertrans hanya mengakui bahwa perusahaan yang terdata merupakan Perusahaan yang sudah dilakukan pembinaan dan pengawasan dari Disnakertrans.

Kegiatan pendukung program yaitu kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar 0 persen, namun untuk indikator kegiatan ini semakin kecil realisasi maka semakin bagus kinerja yang tercapai, hal ini



menunjukkan tidak ada nya perselisihan yang terjadi antara pekerja dan Perusahaan yang ada di Kabupaten Natuna.

Sub kegiatan pendukung adalah Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar perkara, pada indikator ini sama seperti indikator pada kegiatan yang mana semakin kecil realisasi maka semakin baik capaian kinerja yang dihasilkan atau tidak ada perkara yang diselesaikan.

Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja dengan realisasi sebesar 3762 orang atau 115,75 persen.

3.2.3.2. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung NON IKU

Tabel. III.12
Capaian Sasaran serta program Pendukung
Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	81.90	74.20	90.60
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100	74.20	74.20
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	100.00
Terwujudnya pelayanan publik yang prima	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	85	100.00	117.65



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	100.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	33	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	59.00	118.75	201
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	5	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	27	135
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah	60	62	104
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	8	200
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	100	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	59.40	13.06	21.99



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	11	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	14	140
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1	1	100
Terwujudnya penyelesaian permasalahan keteransmigrasian di kawasan transmigrasi Kabupaten Natuna	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Ditetapkan	100	100	100
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Penetapannya	1	1	100
	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1	1	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan	100	100	100
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Kawasan Permukiman yang difasilitasi Pengembangannya	2	2	100
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	6	6	100
BALAI LATIHAN KERJA					
Terwujudnya pelayanan publik yang prima	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	85	100	117.65
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	59	100	169.49
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	5	100



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	100	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100

3.3 Analisis Keuangan

Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 7,104,937,632,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5,879,327,587,- atau 82,75 persen dengan sisa anggaran Rp. 1,225,610,045,- di bandingkan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 302,806,949,-. Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 6,182,134,536,- dari total anggaran sebesar Rp. 7,175,584,769,- atau 86,16 persen dengan sisa anggaran sebesar Rp. 993,450,233,-.

Tabel. III.13
Capaian Sasaran beserta Realiasi Program Pendukung
Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	%	Capaian Indikator Kinerja (%)
IKU					
Sasaran 1 : Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja					100.10
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	270,644,450	222,265,949	82.12	774.24
1.	Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	270,644,450	222,265,949	82.12	104



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	%	Capaian Indikator Kinerja (%)
	1.1.	Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	270,644,450	222,265,949	82.12	100
	Program Penempatan Tenaga Kerja		93,130,970	71,689,925	76.98	2.47
	1.	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	93,130,970	71,689,925	76.98	171,43
	1.1.	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	93,130,970	71,689,925	76.98	100
	Program Hubungan Industrial		128,600,980	45,497,086	35.38	833.33
	1.	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota	128,600,980	45,497,086	35.38	100
	1.1.	Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	91,645,980	33,196,886	36.22	100
	1.2.	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	36,955,000	12,300,200	33.28	116
Total Sasaran 1			492,376,400	339,452,960	68.94	
Non IKU						
Sasaran 2 : Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel						90.60



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	%	Capaian Indikator Kinerja (%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		32,192,080	6,193,070	19.24	90.60
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32,192,080	6,193,070	19.24	74.20
	1.1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32,192,080	6,193,070	19.24	100.00
Total Sasaran 2			32,192,080	6,193,070	19.24	
Sasaran 3 : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima						97.99
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		6,350,218,692	5,362,658,277	84.45	117.65
	1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,906,503,852	4,548,262,594	92.70	100.00
	1.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,906,503,852	4,548,262,594	92.70	100.00
	2.	Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	416,388,640	244,914,874	58.82	100.13
	2.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31,479,000	22,390,000	71.13	100.00
	2.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37,733,300	19,594,300	51.93	100.00
	2.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,736,400	2,730,000	99.77	100.00
	2.4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32,395,340	10,988,900	33.92	100.00
	2.5.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,000,000	675,000	9.64	100.00



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	%	Capaian Indikator Kinerja (%)
	2.6.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305,044,600	188,536,674	61.81	155.00
	3.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211,000,000	55,792,150	26.44	104.08
	3.1.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	211,000,000	55,792,150	26.44	200.00
	4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	483,824,200	426,096,659	88.07	100.00
	4.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37,295,000	27,685,500	74.23	100.00
	4.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98,629,200	62,144,558	63.01	100.00
	4.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	347,900,000	336,266,601	96.66	100.00
	5.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332,502,000	87,592,000	26.34	12.89
	5.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102,412,000	51,298,000	50.09	100.00
	5.2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,090,000	22,530,000	74.88	120.00
	5.3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000	13,764,000	6.88	100.00



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	%	Capaian Indikator Kinerja (%)
BALAI LATIHAN KERJA						
Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	158,751,440	126,565,562	79.73	117.65
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	96,251,440	69,688,492	72.40	100.13
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21,746,400	13,920,160	64.01	100.00
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	457,800	195,000	42.60	100.00
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4,425,000	2,089,000	47.21	100.00
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69,622,240	53,484,332	76.82	620.00
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62,500,000	56,877,070	91.00	100.00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,000,000	5,877,070	83.96	100.00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55,500,000	51,000,000	91.89	100.00
		Total Sasaran 3	6,508,970,132	5,489,223,839	84.33	
Sasaran 4 : Terwujudnya Penyelesaian Permasalahan Keteransmigrasian di Kawasan Trasmigrasi Kabupaten Natuna						127.75
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi		41,230,420	26,956,678	65.38	100.00
	1.	Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	41,230,420	26,956,678	65.38	100.00



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	%	Capaian Indikator Kinerja (%)
	1.1.	Sub Kegiatan Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	41,230,420	26,956,678	65.38	100.00
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		30,168,600	17,501,040	58.01	100.00
	1.	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	30,168,600	17,501,040	58.01	100.00
	1.1.	Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	30,168,600	17,501,040	58.01	100.00
	Total Sasaran 4		71,399,020	44,457,718	62.27	
	Total Sasaran		7,104,937,632	5,879,327,587	82.75	



Perbandingan realisasi anggaran sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.14.
Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Capaian Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja Sasaran			Capaian Indikator Kinerja
			Anggaran	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	871.453.000,00	694.917.384,00	79,74	100,11
			871.453.000,00	694.917.384,00	79,74	

Berdasarkan data pada tabel diatas alokasi anggaran untuk pencapaian target sasaran strategis meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja sesuai Penetapan Perjanjian (Penja) Tahun 2023 sebesar Rp. 871.453.000,00 terealisasi Rp. 694.917.384,00 (79,74%) dengan capaian indikator kinerja 100,11 persen. Adapun program pendukung terdiri atas 3 (tiga) program yaitu:

- Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja sebesar Rp. 500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 447.183.447,00 (89,44%).
- Program penempatan tenaga kerja sebesar Rp. 200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 171.462.407,00 (85,73%).
- Program hubungan industrial sebesar Rp. 171.453.000,00 terealisasi sebesar Rp. 76.271.530,00 (44,49%).



III.15.

**Capaian Kinerja Berdasarkan Realisasi Anggaran Didukung
Program dan Kegiatan Tahun 2023**

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2023			Capaian Indikator Kinerja
		Anggaran	Realisasi	%	
Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	500,000,000.00	447,183,447.00	89.44	850
	Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	500,000,000.00	447,183,447.00	89.44	98,80
	Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	500,000,000.00	447.183.447.00	89.44	100
	Program Penempatan Tenaga Kerja	200,000,000.00	171,462,407.00	85,73	73.20
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000.00	171,462,407.00	85,73	100
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	200,000,000.00	171,462,407.00	85,73	160
	Program Hubungan Industrial	171,453,000.00	76,271,530.00	44.49	897.44
	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota	171,453,000.00	76,271,530.00	44.49	100
	Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	130,131,000.00	58,311,930.00	44.81	100
	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	41,322,000.00	17,959,600.00	97.65	122.09
	Jumlah	871,453,000.00	694,917,384.00	79.74	259,57



1.4. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

III.16.
Anggaran dan Realisasi per Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sasaran dan Program IKU									
1	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,36	72,43	100.11	492,376,400.00	339,452,960.00	68.94	152,923,440.00
Sasaran dan Program Pendukung									
2	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Keteransmigrasian di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Natuna	Persentase Penyelesaian Permasalahan keteransmigrasian yang diselesaikan	65	83.04	127.75	71,399,020.00	44,457,718.00	62.27	26,941,302.00
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	81.9	74.2	90.60	32,192,080.00	6,193,070.00	19.24	5,999,010.00
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.48	3.41	90.78	6,508,970,132.00	5,489,223,839.00	84.33	1,019,746,293.00
Total						7,104,937,632.00	5,879,327,587.00	82.75	1,225,610,045.00

Dari tabel diatas menunjukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama Tahun 2024 dapat melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 1,225,610,045,- atau 17,25 persen, dibandingkan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp.232,159,813,- (23,37 %).

Perbandingan Anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran sebagai berikut :



Tabel III.17
Anggaran dan Realisasi per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (RP)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (Rp.)	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							10
Sasaran dan Program IKU									
1	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,35	72,43	100.11	871,453,000.00	694,917,384.00	79.74	176,535,616.00
Sasaran dan Program Pendukung IKU									
2	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Keteransmigrasian di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Natuna	Persentase Penyelesaian Permasalahan keteransmigrasian yang diselesaikan	60	79.61	132.68	218,547,000.00	88,481,699.00	40.49	130,065,301.00
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	81,89	71,05	86.76	34,105,810.00	9,472,256.00	27.77	24,633,554.00
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,47	3,15	90.78	6,051,478,958.00	5,389,263,197.00	89.06	662,215,761.00
Total						7,175,584,768.00	6,182,134,536.00	86.16	993,450,232.00

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna sebesar 6,182,134,536.00 atau 86,16% dari total anggaran sebesar Rp. 7.175.584,768.00 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 993,450,232.00 atau 13,84%.



BAB IV PENUTUP

4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis

Pada Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna menetapkan 1 sasaran dengan 1 indikator kinerja sasaran strategis yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (Penja) Tahun 2024, capaian kinerja mampu direalisasikan dengan baik yaitu sebesar 100,10 % atau interpretasi sangat memuaskan.

4.2. Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis

Walaupun capaian kinerja yang diperoleh Tahun 2024 sangat memuaskan, bukan berarti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja strategis yang ditetapkan, kendala yang dihadapi yaitu :

- 1) Lulusan tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia;
- 2) Masih banyaknya lulusan pelatihan yang menganggur;
- 3) Lapangan pekerjaan terbatas, Kabupaten Natuna bukanlah merupakan daerah industri seperti kota-kota besar, lapangan pekerjaan yang tersedia terlalu sedikit sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi sedikit yang menyebabkan pengangguran;
- 4) Minimnya pencari kerja yang terdaftar di AK1 dan pencari kerja tidak melapor ke Dinas atas terimanya mereka bekerja;
- 5) Target Program yang sulit untuk dicapai

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

Sehubungan dengan kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna mengambil langkah (strategi) pemecahan sebagai berikut :

- 1) Berkomitmen untuk menjadikan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebagai program unggulan untuk peningkatan;
- 2) Melakukan kerjasama atau MoU dengan pengusaha yang ada di Kabupaten Natuna dalam hal penempatan tenaga kerja yang sudah dilatih oleh BLK Natuna;
- 3) Mengingatkan kepada pendaftar AK1 agar melapor ke Dinas jika sudah diterima bekerja;
- 4) Mengevaluasi target kinerja program dan melakukan koordinasi ke BP3D untuk menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disajikan agar dapat memberikan informasi dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Ranai, 13 Januari 2025



KEPALA DINAS
INDRA JONI, S.Sos
NIP. 19700903 199201 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **HUSSYAINI, S. IP**

Jabatan : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **BUPATI NATUNA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 08 Januari 2024

Pihak Kedua,



WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,



HUSSYAINI, S. IP

NIP. 19640806 199103 1 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	72.36

Jumlah Anggaran :

1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	5.540.340.996,00
2.	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp.	41.000.000,00
3.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp.	271.129.700,00
4.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp.	92.645.720,00
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp.	30.000.000,00
6.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp.	129.000.000,00
Jumlah		Rp.	6.104.116.416,00

Ranai, 08 Januari 2024

Bupati Natuna,

**Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi**


WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si


HUSSYAINI, S. IP
NIP. 19640806 199103 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **INDRA JONI, S. Sos**

Jabatan : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **BUPATI NATUNA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perubahan perjanjian kinerja tersebut meliputi perubahan anggaran dari Rp. 6.104.116.416,00 (Enam milyar seratus empat juta seratus enam belas ribu empat ratus enam belas) menjadi Rp. 7.104.937.632,00 (Tujuh milyar seratus empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua) sehingga mempengaruhi target kinerja awal. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 20 September 2024

Pihak Kedua,



WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,



INDRA JONI, S. Sos
NIP. 19700903 199201 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	72.36

Jumlah Anggaran :

1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	6.541.162.212,00
2.	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp.	41.230.420,00
3.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp.	270.644.450,00
4.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp.	93.130.970,00
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp.	30.168.600,00
6.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp.	128.600.980,00
Jumlah		Rp.	7.104.937.632,00

Ranai, 20 September 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi



WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si



INDRA JONI, S. Sos
NIP. 19700903 199201 1 001

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	72.36	72.43	100.10

	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	(%)
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,541,162,212.00	5,495,416,909.00	84.01
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja	270,644,450.00	222,265,949.00	82.12
- Program Penempatan Tenaga Kerja	93,130,970.00	71,689,925.00	76.98
- Program Hubungan Industrial	128,600,980.00	45,497,086.00	35.38
- Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	41,230,420.00	26,956,678.00	65.38
- Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	30,168,600.00	17,501,040.00	58.01
	7,104,937,632.00	5,879,327,587.00	82.75

Ranai, 6 Januari 2025

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi

